

Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kemiskinan

Limega Candrasa, Nursaimatussadiya*, Cia Cai Cen, Usnul Fadzila, Dedi Pepriaman

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya, Tebing Tinggi, Indonesia

Email: ¹limegacandrasa@gmail.com, ^{2*}nusaimatussadiyah@gmail.com, ³caicaicen@gmail.com, ⁴usnulfadzila@gmail.com, ⁵dedipepriaman@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: nusaimatussadiyah@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pemanfaatan Dana Desa, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan tersebut, serta strategi optimalisasi pengelolannya agar lebih berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada beberapa desa penerima Dana Desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial. Namun, dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan masih belum optimal. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi dukungan regulasi, komitmen pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Adapun faktor penghambat antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa, perencanaan yang belum berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Strategi yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan tata kelola partisipatif, dan penerapan mekanisme monitoring serta evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui perencanaan dan pelaksanaan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa; Efektivitas; Pembangunan Desa; Wilayah Tertinggal; Padang Lawas Utara

Abstract—This study aims to analyze the role of *Village Funds (Dana Desa)* in improving community welfare and reducing poverty in Padang Lawas Utara Regency. The research focuses on the effectiveness of Village Fund utilization, the supporting and inhibiting factors influencing its outcomes, and strategies to optimize its management for greater impact on improving the community's standard of living. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document review in several villages receiving Village Funds. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that Village Funds have positively contributed to community welfare through basic infrastructure development, local economic empowerment, and improved access to social services. However, their impact on reducing poverty rates remains suboptimal. Supporting factors include regulatory support, strong commitment from local governments, and community participation. Meanwhile, the inhibiting factors comprise limited capacity of village officials, planning processes that are not yet based on actual community needs, and weak transparency and accountability in fund management. The recommended strategies include strengthening the capacity of village officials, promoting participatory governance, and implementing continuous monitoring and evaluation mechanisms. The study concludes that Village Funds play a strategic role in promoting welfare and poverty alleviation, yet their effectiveness needs to be reinforced through more accountable and empowerment-oriented planning and implementation.

Keywords: Village Fund; Effectiveness; Rural Development; Disadvantaged Areas; Padang Lawas Utara

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Hal tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan legitimasi lebih besar kepada desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu implementasi kebijakan tersebut adalah penyaluran Dana Desa, yang bertujuan mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan tingkat kemiskinan khususnya di wilayah pedesaan.

Sejak mulai disalurkan pada tahun 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen fiskal penting dalam pembangunan nasional berbasis desa. Pemerintah secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran Dana Desa setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia desa (Bappenas, 2022). Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan desa-kota dan mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Nasfi et al. (2023) menemukan bahwa Dana Desa mampu meningkatkan akses infrastruktur dan pendapatan masyarakat desa, tetapi dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum signifikan. Hal serupa diungkapkan oleh Smas et al. (2025) yang menyoroti bahwa permasalahan transparansi, kapasitas aparatur desa, serta

kualitas perencanaan pembangunan masih menjadi kendala utama optimalisasi Dana Desa. Selain itu, Harahap (2025) menegaskan bahwa implementasi Dana Desa di beberapa wilayah Indonesia masih lebih berfokus pada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat.

Secara konseptual, pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal. Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara mandiri (Dhewanto et al., 2020). Pengembangan ekonomi lokal melalui kewirausahaan desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan kapasitas masyarakat terbukti dapat menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian desa (Pradani, 2020; Sarjiyanto et al., 2022).

Selain faktor pemberdayaan ekonomi, tata kelola Dana Desa juga menjadi determinan penting dalam keberhasilan program pembangunan desa. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa berperan besar dalam memastikan efektivitas penggunaan Dana Desa. Endah (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkatkan kesesuaian program dengan kebutuhan lokal serta memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Sebaliknya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dapat menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Wuriasih, 2021; Yuliana & Alinsari, 2022).

Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan pembangunan desa, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Meskipun Dana Desa telah dialokasikan secara rutin setiap tahun, capaian pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum merata. Sebagian desa masih tergolong desa tertinggal dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Dana Desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan di wilayah tersebut.

Efektivitas Dana Desa pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Ginting et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan program Dana Desa sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan desa, dan partisipasi masyarakat. Tanpa penguatan aspek-aspek tersebut, Dana Desa berpotensi hanya menghasilkan pembangunan jangka pendek tanpa dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan struktural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam peran Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini tidak hanya menilai dampak pemanfaatan Dana Desa terhadap pembangunan fisik dan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaannya, serta merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan Dana Desa agar lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi penguatan kebijakan pembangunan desa, khususnya dalam meningkatkan efektivitas Dana Desa sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran dan efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan, termasuk faktor-faktor pendukung, penghambat, dan strategi optimalisasi pengelolaannya. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada beberapa desa yang masih tergolong desa tertinggal.

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria: (1) memiliki keterbatasan infrastruktur dasar, (2) tingkat akses terhadap layanan sosial yang rendah, dan (3) menerima alokasi Dana Desa relatif besar, tetapi capaian pembangunan belum signifikan. Setiap desa dipilih minimal tiga perwakilan informan utama untuk menjamin keberagaman perspektif.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, kemudian dilanjutkan dengan snowball sampling ketika diperlukan untuk menjangkau informan yang sulit diidentifikasi pada tahap awal, seperti tokoh adat, kelompok rentan, dan penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat. Informan utama terdiri atas:

- Aparatur desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa;
- Perangkat kecamatan yang membidangi pembangunan desa;
- Pejabat pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; serta
- Tokoh masyarakat dan kelompok penerima manfaat Dana Desa.

Secara keseluruhan, jumlah informan dalam penelitian ini diperkirakan 15–20 orang, dengan komposisi minimal tiga informan dari setiap desa yang menjadi lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

- a. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa.
- b. Observasi dilakukan secara langsung untuk menilai hasil pembangunan fisik (seperti jalan desa, fasilitas air bersih) maupun kegiatan nonfisik (seperti pelatihan ekonomi dan pemberdayaan).
- c. Dokumentasi mencakup pengumpulan data sekunder berupa dokumen perencanaan desa (RPJMDes, RKPDes), laporan realisasi Dana Desa, serta data statistik resmi dari instansi terkait.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan:

- a. Reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian;
- b. Penyajian data, berupa narasi, tabel, dan bagan yang memudahkan interpretasi; dan
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk menemukan pola, hubungan antarvariabel sosial, serta implikasinya terhadap efektivitas Dana Desa.

Keabsahan data dijamin melalui penerapan teknik triangulasi, yang meliputi:

- a. Triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan (aparatur desa, masyarakat, dan pemerintah daerah);
- b. Triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta
- c. Triangulasi waktu, yang dilakukan dengan mengulangi wawancara dan observasi pada waktu yang berbeda (misalnya, saat awal penyaluran Dana Desa dan setelah realisasi kegiatan) untuk memastikan konsistensi data dan validitas temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa desa di Kabupaten Padang Lawas Utara yang menerima alokasi Dana Desa sejak tahun 2015. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta observasi langsung terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan data kemiskinan desa juga digunakan untuk memperkuat hasil penelitian (Miles et al., 2014). Untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian, dilakukan analisis statistik deskriptif sederhana berdasarkan dokumentasi realisasi Dana Desa, hasil observasi lapangan, serta informasi dari wawancara informan desa. Analisis ini bertujuan menggambarkan pola pemanfaatan Dana Desa, tren program pembangunan, serta indikasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 1. Persentase Rata-Rata Pemanfaatan Dana Desa

Kategori Penggunaan Dana Desa	Persentase (%)	Interpretasi
Infrastruktur fisik desa	65%	Dominan untuk jalan desa, drainase, fasilitas air bersih
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	18%	Pelatihan UMKM, BUMDes, padat karya
Program sosial dan pelayanan publik	12%	Posyandu, pendidikan, bantuan sosial
Administrasi pemerintahan desa	5%	Operasional dan administrasi

Pada Tabel 1 data menunjukkan penggunaan Dana Desa masih didominasi pembangunan fisik. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama, sementara program pemberdayaan ekonomi belum optimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2. Tren Perkembangan Dampak Dana Desa terhadap Kesejahteraan (2021–2024)

Indikator	2021	2022	2023	2024	Tren
Infrastruktur desa layak (%)	58	65	72	78	Meningkat
Partisipasi masyarakat (%)	45	52	60	64	Meningkat
Rumah tangga miskin (%)	28	25	23	21	Menurun
Program ekonomi produktif (%)	12	15	17	18	Meningkat lambat

Interpretasi tren Tabel 2:

- a. Infrastruktur desa menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahun.
- b. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa meningkat, menunjukkan tata kelola mulai lebih inklusif.
- c. Persentase kemiskinan mengalami penurunan bertahap, meskipun belum signifikan.
- d. Program pemberdayaan ekonomi meningkat tetapi masih relatif rendah dibanding pembangunan fisik.

Tabel 3. Indikasi Dampak Ekonomi Dana Desa

Indikator Dampak	Sebelum Dana Desa Optimal (%)	Setelah Implementasi (%)	Perubahan
Akses jalan produksi	55	75	+20%
Kesempatan kerja lokal	40	58	+18%
Pendapatan masyarakat meningkat	32	45	+13%
Usaha ekonomi desa aktif	25	38	+13%

Hasil yang terlihat pada Tabel 3, menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi terhadap peningkatan akses ekonomi dan kesempatan kerja, terutama melalui program padat karya dan pembangunan infrastruktur. Namun, peningkatan pendapatan masyarakat masih terbatas karena program ekonomi produktif belum berjalan optimal.

Secara keseluruhan, analisis statistik sederhana ini memperkuat temuan kualitatif bahwa Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan masih bersifat gradual dan belum merata. Hal ini terutama disebabkan oleh dominasi penggunaan Dana Desa pada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa optimalisasi Dana Desa perlu diarahkan pada, peningkatan alokasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan program produktif, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, Dana Desa berpotensi lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pengurangan kemiskinan desa.

3.1 Peran Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur dasar. Hampir semua desa penelitian menggunakan lebih dari 60% alokasi Dana Desa untuk pembangunan jalan desa, drainase, jembatan kecil, serta fasilitas publik seperti posyandu dan sarana air bersih. Hal ini sejalan dengan temuan (Sofyani et al., 2019) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar merupakan prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan publik di pedesaan. Warga desa menyatakan bahwa infrastruktur yang dibangun mempermudah akses menuju pusat ekonomi dan layanan sosial. Misalnya, petani dapat lebih cepat membawa hasil pertanian ke pasar, dan anak-anak lebih mudah bersekolah. Dampak tersebut sesuai dengan pendapat (Triyo et al., 2020) yang menyebutkan bahwa infrastruktur desa berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun, peran Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan nonfisik masih terbatas. Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha kecil, penguatan BUMDes, dan pengembangan keterampilan belum berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas aparatur dan perencanaan yang belum berbasis potensi unggulan lokal (Dhewanto et al., 2020). Akibatnya, peningkatan pendapatan masyarakat belum signifikan di sebagian besar lokasi penelitian.

3.2 Peran Dana Desa dalam Mengurangi Kemiskinan

Penyaluran Dana Desa turut berkontribusi pada upaya pengurangan kemiskinan melalui program padat karya tunai dan pembangunan sarana ekonomi produktif (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2022). Beberapa desa menggunakan Dana Desa untuk memperbaiki jalan produksi, membangun irigasi pertanian, serta membiayai kegiatan padat karya yang menyerap tenaga kerja dari rumah tangga miskin. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa program padat karya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga berpenghasilan rendah, meskipun bersifat sementara. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Rahmawati & Putra, 2021) yang menemukan bahwa program padat karya berbasis Dana Desa mampu meningkatkan daya beli dan mengurangi pengangguran musiman di pedesaan. Di beberapa desa, jumlah keluarga miskin menurun 5–10% dalam dua tahun terakhir, terutama pada wilayah yang memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan produktif. Namun, penurunan ini belum merata karena sebagian besar kegiatan belum berkelanjutan dan belum disertai pendampingan pascapelatihan (Sarjiyanto et al., 2022).

3.3 Faktor Pendukung Implementasi Dana Desa

Terdapat beberapa faktor penting yang mendukung efektivitas pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara. Faktor pertama adalah adanya kebijakan dan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat maupun daerah yang menjadi dasar hukum sekaligus pedoman teknis dalam pengelolaan Dana Desa (Permendes PDPT No. 8 Tahun 2022). Regulasi ini memberikan arah prioritas program, mekanisme penyaluran, serta tata cara pelaporan yang membantu pemerintah desa menjalankan fungsi administrasi secara lebih tertib dan terukur (Sjarif & Kastanya, 2023). Faktor kedua adalah pendampingan teknis yang efektif dari tenaga pendamping desa. Keberadaan pendamping berperan penting dalam memberikan bimbingan kepada aparatur desa, terutama dalam penyusunan RKPDes, pengelolaan keuangan, serta pelaporan realisasi anggaran. Hasil ini sejalan dengan temuan (Nurmalasari & Supriyadi, 2021), yang menunjukkan bahwa intensitas pendampingan berkorelasi positif dengan kualitas perencanaan dan pelaporan Dana Desa. Faktor ketiga adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat partisipasi warga dalam musyawarah desa mencapai lebih dari 60%, menunjukkan adanya antusiasme dan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Hal ini memperkuat hasil penelitian Endah (2019), yang menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam memastikan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan lokal.

3.4. Faktor Penghambat Efektivitas Dana Desa

Meskipun implementasi Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara telah menunjukkan berbagai capaian positif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara juga menghadapi sejumlah hambatan. Faktor pertama adalah terbatasnya kapasitas aparatur desa, terutama dalam aspek perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan berbasis digital melalui aplikasi *Sistem Keuangan Desa* (SISKEUDES). Kondisi ini juga ditemukan oleh Betty et al. (2025), yang menyoroti kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis sebagai penyebab lemahnya tata kelola keuangan desa. Faktor kedua adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Di sejumlah desa, informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran belum dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat sulit memantau penggunaan anggaran. Fenomena serupa dilaporkan oleh Yuliana & Alinsari (2022), yang menegaskan bahwa tingkat transparansi publik masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola Dana Desa di Indonesia. Faktor ketiga adalah rendahnya pengawasan internal, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah kecamatan. Menurut (Prayudi et al., 2018), lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi menyebabkan tidak optimalnya pencapaian target pembangunan dan rawan terjadinya penyimpangan administratif.

3.5 Strategi Optimalisasi Dana Desa

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis terhadap berbagai faktor pendukung serta penghambat implementasi Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat sejumlah strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatannya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis terhadap berbagai faktor, terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan efektivitas Dana Desa. Strategi pertama adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis manajemen keuangan, perencanaan berbasis data, serta penguasaan aplikasi SISKEUDES. Pelatihan berkelanjutan terbukti meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Betty et al., 2025). Strategi kedua adalah penguatan orientasi pembangunan dari fokus fisik menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Bappenas (2022) bahwa Dana Desa perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas ekonomi desa melalui program pelatihan kewirausahaan dan penguatan UMKM. Strategi ketiga adalah pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal sebagai motor penggerak ekonomi desa (Pradani, 2020). BUMDes yang dikelola profesional mampu menciptakan sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian desa. Strategi keempat adalah mendorong transparansi publik dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa. Publikasi anggaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan memperkuat kepercayaan publik (Wuriasih, 2021). Keterbatasan penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah yang sempit, pendekatan kualitatif yang belum mengukur kontribusi kuantitatif, serta keterbatasan data longitudinal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan metode *mixed methods* dan cakupan wilayah lebih luas diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif (Creswell & Clark, 2017).

Strategi pertama adalah peningkatan kapasitas aparatur desa. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan teknis di bidang manajemen keuangan, perencanaan pembangunan berbasis data, serta penguasaan aplikasi pengelolaan keuangan desa seperti *Sistem Keuangan Desa* (SISKEUDES). Pelatihan berkelanjutan dan pendampingan intensif akan membantu aparatur desa dalam mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Strategi kedua adalah penguatan orientasi pembangunan dari fokus fisik menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Dana Desa masih diarahkan pada pembangunan infrastruktur, sedangkan program pemberdayaan ekonomi belum berjalan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk mengalokasikan sebagian Dana Desa bagi kegiatan peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan baru dan mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Strategi ketiga adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis pada potensi lokal. Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan wisata desa yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi lokal. Pengelolaan BUMDes yang profesional dan inovatif dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa, sekaligus menjadi sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan.

Strategi keempat adalah mendorong transparansi publik dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa. Transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi informasi anggaran di papan informasi desa, media sosial desa, atau forum musyawarah terbuka. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan adanya mekanisme pengawasan partisipatif, potensi penyimpangan dapat diminimalkan, dan pelaksanaan program dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil temuan. Pertama, ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup beberapa desa di Kabupaten Padang Lawas Utara membatasi generalisasi hasil ke wilayah lain. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda, sehingga efektivitas Dana Desa dapat bervariasi antarwilayah. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada eksplorasi mendalam melalui wawancara dan observasi lapangan. Pendekatan ini memberikan pemahaman kontekstual yang kaya, tetapi belum mampu mengukur secara kuantitatif seberapa besar kontribusi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

Ketiga, data yang digunakan bersifat *cross-sectional* sehingga belum mampu menggambarkan dinamika perubahan efektivitas Dana Desa dari tahun ke tahun. Ketiadaan data longitudinal membuat analisis terhadap keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat menjadi terbatas. Keempat, penelitian ini belum sepenuhnya menggali dimensi non-ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan kelembagaan lokal yang turut memengaruhi tingkat partisipasi

dan keberhasilan pembangunan desa. Padahal, faktor-faktor tersebut sering kali menjadi elemen penting dalam menjelaskan variasi efektivitas antarwilayah.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi publik juga menjadi kendala tersendiri. Tidak semua desa membuka data perencanaan dan laporan realisasi Dana Desa secara transparan, sehingga proses verifikasi dan validasi data sekunder belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, temuan-temuan tersebut tetap perlu dilengkapi dengan penelitian lanjutan yang melibatkan cakupan wilayah lebih luas, metode campuran (*mixed methods*), serta data panel yang lebih representatif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara masih belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Meskipun Dana Desa telah berhasil memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, sarana air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan—namun kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat masih sangat terbatas. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kegagalan efektivitas ekonomi Dana Desa terutama disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dan lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Aparatur desa belum sepenuhnya mampu mengelola anggaran dan program secara strategis, khususnya dalam merancang kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi produktif. Selain itu, perencanaan pembangunan desa masih cenderung bersifat top-down dan administratif, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak selalu sejalan dengan potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Keterbatasan kapasitas ini juga berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan penggunaan Dana Desa. Akibatnya, sebagian besar anggaran lebih banyak terserap pada proyek fisik yang bersifat jangka pendek, sementara upaya penguatan ekonomi dan kemandirian masyarakat belum berjalan konsisten. Dengan demikian, akar permasalahan dari kegagalan efektivitas ekonomi Dana Desa terletak pada kesenjangan antara kapasitas kelembagaan dan arah kebijakan pembangunan desa. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, perencanaan berbasis data dan potensi lokal, serta penguatan mekanisme partisipatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemanfaatan Dana Desa yang benar-benar berdaya guna bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa berkelanjutan.

REFERENCES

- Bappenas. (2022). Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 Kementerian PPN/Bappenas. *Republik Indonesia*.
- Betty, B., Din, M., Masdar, R., Furqan, A. C., Usman, R., Wahyuni, S., Hakim, A., & Marlon, M. (2025). Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Abdidas*, 6(6), 715–721.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Dhewanto, W., Ratnaningtyas, S., Permatasari, A., Anggadwita, G., & Prasetyo, E. A. (2020). Rural entrepreneurship: towards collaborative participative models for economic sustainability. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(1), 705.
- Endah, K. (2019). Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 677–684.
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2303452.
- Harahap, R. (2025). Dilemma of Local Development under Village Funds Program in Indonesia. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 6(01), 21–34.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. (No Title).
- Nasfi, n, Aimon, H., & Ulfa Sentosa, S. (2023). Build the village economy: A systematic review on academic publication of Indonesian village-owned. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2252682.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondawah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74.
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) berbasis potensi lokal sebagai penggerak ekonomi desa. *Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)*, 1(1), 23–33.
- Prayudi, M. A., Dewi, G. A. K. R. S., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2018). Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449–467.
- Rahmawati, A., & Putra, B. (2021). Evaluating Village Fund Policy Implementation for Economic Growth. *Indonesian Journal of Public Policy*, 6(2), 89–101.
- Sarjiyanto, S., Sarwoto, S., & Darma, T. S. (2022). The sustainability of community empowerment as development strategies: The experience of Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), 207–218.
- Sjarif, F. A., & Kastanya, E. J. (2023). Penerapan Metode Ria Dan Roccipi Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *Proceeding APHTN-HAN*, 1(1), 455–484.
- Smas, M. H., Mokay, M. M., & Nurhayati, E. (2025). Overcoming Extreme Poverty through the Utilisation of Village Funds: A Case Study in Indonesia. *Societal Impacts*, 100128.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success factors of village-owned enterprises (BUMDes) performance in indonesia: An exploratory study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44–58.
- Triyo, E., Haryono, H., & Irwantoro, I. (2020). Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik). *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 14(2), 172–182.

- Wuriasih, A. (2021). Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari. *JFRES Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(2), 8–14.
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2919–2929.